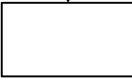
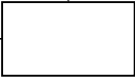
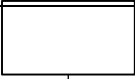
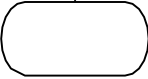


**SOP****DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH XV PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Nomor SOP	:	003/SOP/BPTDXV-TU/2022
Tgl. Disahkan	:	04 Januari 2022
Tgl. Revisi	:	
Tgl. Diberlakukan	:	04 Januari 2022
Disahkan oleh	:	Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XV Provinsi Kalimantan Selatan  Zulmardi, ATD., M.M. NIP. 19680317 199103 1 002

PENYIAPAN BAHAN PENYUSUNAN EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Dasar Hukum:	Cara mengatasi:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara 3. UU 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 4. PP 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga 5. PP 8 Tahun Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 6. PP 39 Tahun 2006 Tentang Tata Car Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 7. PP 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional 8. PP 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara 9. PP 40 Tahun 2015 Tentang Kementerian Perhubungan 10. PP 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 11. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1. Membuat Rapat Koordinasi sebelum pelaksanaan dan menentukan batas waktu yang jelas 2. Mengikuti Sosialisasi/Bimbingan Teknis mengenai kelengkapan data dan menyampaikan data jika sudah lengkap
Keterkaitan:	Peralatan:
1. SOP Pembentukan SK Tim Kerja 2. SOP Permintaan Bahan/Data Dukung 3. SOP Pembuatan Nota Dinas/Undangan 4. SOP Pengadaan Rapat 5. SOP Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	A. Sarana Prasarana Meja, Kursi, Ruang Kerja, Komputer/Laptop, Lemari Arsip, Filing Cabinet, ATK, Printer
Peringatan:	
Risiko yang mungkin terjadi	
1. Keterlambatan informasi dan bahan masukan 2. Data masukan dari subsektor lain salah	

No	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku			Keterangan
		Kepala BPTD Ka Subbag TU Staf Penyusun SAKIP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Memerintahkan Kasubbag TU untuk menugaskan staf yang membidangi penyusunan SAKIP mengikuti Bimtek Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Surat Undangan dari Setditjen Hubdat, PM 45 Tahun 2016, Disposisi	10 Menit	Disposisi	
2.	Menugaskan staf yang membidangi penyusunan SAKIP untuk mengikuti Bimtek Evaluasi SAKIP		Surat Undangan dari Setditjen Hubdat, PM 45 Tahun 2016, Disposisi	15 Menit	Disposisi	
3.	Mengikuti Bimtek Evaluasi Penyusunan SAKIP		Surat Undangan dari Setditjen Hubdat, PM 45 Tahun 2016, Dokumen SAKIP	3 hari kerja	Draft Dokumen SAKIP	
4.	Menyetujui draft dokumen SAKIP BPTD		Draft Dokumen SAKIP	1 hari kerja	Draft Dokumen SAKIP	
5.	Mengumpulkan hasil evaluasi Draft Dokumen SAKIP melalui Subbag Analisa dan Evaluasi Bagian Perencanaan		Draft Dokumen SAKIP	30 Menit	Dokumen SAKIP BPTD	